

**ANALISIS PEMBANGUNAN DESA BERBASIS *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*  
GOALS DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(Studi di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



**Disusun Oleh:**

**LELI VALIANA MARSELA**

**NIM. 2018210142**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

Pemajuan provinsi merupakan salah satu pendekatan otoritas publik untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 8 memandang bahwa Pembangunan Desa adalah suatu usaha untuk mengusahakan kepuasan dan kehidupan pribadi sebesar-besarnya dapat diharapkan atas bantuan pemerintah dari kelompok masyarakat Desa. Alasan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan merinci pembangunan kota dalam pandangan tujuan kemajuan ekonomi dalam memahami bantuan pemerintah dari individu Desa Kalisongo.

Eksplorasi semacam ini menggunakan teknik subjektif. Sumber informasi yang digunakan adalah informasi esensial dan informasi tambahan. Prosedur pemilahan informasi seperti pertemuan, persepsi, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa perbaikan kota berdasarkan tujuan kemajuan yang layak dalam mengakui bantuan pemerintah daerah di Desa Kalisongo belum diakui pada standar tujuan perbaikan yang dapat dikelola, khususnya: bantuan keuangan pemerintah yang baik, iklim yang kondusif, hak-hak sipil yang dikuasai, dan mendukung iklim.

**Kata kunci:** *Sustainable Development Goals* (Pembangunan berkelanjutan), Kesejahteraan Masyarakat, Desa Kalisongo.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembenahan provinsi adalah salah satu pendekatan otoritas publik untuk mengurangi kebutuhan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 8 memandang bahwa Pembangunan Desa adalah suatu usaha untuk mengusahakan kepuasan dan kehidupan pribadi yang setinggi-tingginya atas bantuan pemerintah kelompok masyarakat Desa. Mengingat berbagai peraturan di atas, bagaimana pelaksanaan teknik-teknik untuk lebih mengembangkan perbaikan kota lokal yang belum membuahkan hasil dalam melaksanakan metodologi secara merata yang menimbulkan berbagai tingkat kemiskinan di setiap kecamatan. Salah satu variabel yang mempengaruhi kemajuan pelaksanaan UU ini adalah masih banyak kabupaten/kota yang belum memiliki pedoman bagaimana pembagian kewenangan kota secara adil.

Perbaikan pada dasarnya ditujukan untuk memajukan kabupaten-kabupaten yang belum matang, dengan perbaikan yang tidak memihak yang dapat memajukan berbagai daerah yang dapat mendorong lokal, karena disadari bahwa daerah-daerah tersebut akan meningkat secara pasti, baik keuangan, sosial dan kerangka kerja sehingga kemajuan yang wajar akan mendorong masyarakat yang sejahtera. , siap bersaing, memiliki sifat amanah dan memiliki kemampuan memahami yang tinggi (Adisasmita, 2013: 57).

Dalam peningkatan yang wajar ini terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kemajuan kemajuan kota, lebih spesifiknya:

## **1. Faktor Pendukung**

- a. Letak geologis Desa, khususnya aksesibilitas aset normal tertentu, misalnya, besarnya kebutuhan dana bantuan yang harus dilihat sebagai jenis masalah yang harus dianggap seperti akses ke aset keuangan yang diharapkan.
- b. Penduduk kota, secara spesifik, jumlah penduduk yang besar merupakan keuntungan yang sangat besar bagi kota, jika potensi tersebut dapat dikembangkan, terutama karakteristik fisik dan keilmuannya, selain menjadi sumber pekerjaan yang besar dan menjadi pasar modern publik. , juga bisa menjadi ibu kota utama Desa Kalisongo. .
- c. Kelimpahan normal, khususnya, kemajuan peningkatan keuangan yang telah dicapai di kota sejauh ini tidak dapat dipisahkan dari bantuan aset tetap yang dimiliki, yang merupakan modal penting dari perputaran uang wilayah.

## **2. Faktor Penghambat**

- a. Rendahnya efisiensi penduduk di kota, khususnya tidak adanya efisiensi di kota yang masih rendah dan tingkat penduduk yang sangat tinggi, membuat aset pembangunan manusia umumnya akan menjadi beban yang menghambat laju pembangunan kota.
- b. Disparitas sosial kota, khususnya transportasi gaji, lowongan pekerjaan (pengangguran), administrasi kesejahteraan, antar peningkatan wilayah dapat menimbulkan keinginan sosial.
- c. Tingkat pendidikan kota, khususnya tingkat pendidikan secara keseluruhan masih rendah dan masih banyak individu yang tidak terampil.

Perbaikan yang dapat dipertahankan telah ada selama jangka waktu Stockholm pada tahun 1972, cara paling umum untuk melakukan perbaikan yang wajar yang memerlukan waktu yang cukup lama dan kemajuan yang diakui diakui oleh semua pertemuan memerlukan

perubahan dan presentasi yang dapat dilakukan oleh area lokal. Dikutip dari Alisjahbana dan Endah, (2018:2) pada tahun 2015 peningkatan Sustainable Development Goals (SDGs) yang baru diakui mulai membaik di setiap negara, karena diakui bahwa kemajuan yang dilakukan akan membuat individu-individu di bangsa ini semakin maju, Oleh karena itu, peningkatan tersebut dipandang signifikan oleh masing-masing negara.

Sesuai (Alisjahbana dan Endah, 2018: 44) mengacu pada pentingnya mengakui perbaikan praktis di bidang moneter dan sosial dapat membuat aktivitas publik di mata publik jelas akan mempengaruhi kehidupan individu. Hal ini cenderung beralasan bahwa suatu tindakan perbaikan yang dilakukan memiliki kemampuan dan alasan agar kemajuan di bidang sosial dan keuangan keadaan daerah saat ini dapat menopang bantuan pemerintah daerah setempat.

Sesuai (Alisjahbana dan Endah, 2018: 58), dinyatakan dalam bukunya bahwa tujuan peningkatan ekonomi memiliki misi dalam mendukung kemajuan yang biasanya dibatasi sebagai SGDS, yaitu memiliki janji untuk peningkatan Milenium disebut MDGs dengan nama yang berbeda MDGs Plus. Di sini visi yang akan dibawa oleh SDGs dapat dimaknai sejenak sebagai berikut:

“Melalui sendiri dipisahkan menjadi 3 divisi, untuk Gevornance keuangan, sosial dan ekologi tertentu. Dalam pelaksanaannya, aplikasi topikal, mencakup semua dan terkoordinasi memiliki 17 tujuan, yang masing-masing terkait erat. Untuk memahami visi tersebut, SDGs memiliki mimpi agar upaya bersama dapat dilakukan oleh masing-masing asosiasi administrasi, pembentukan rahasia, organisasi sedikit demi sedikit hingga masyarakat dapat dipersilahkan untuk berpartisipasi”.

Visi yang diselesaikan memiliki bagian-bagian utama yang memiliki tujuan kemajuan yang mendukung, yaitu:

1. Membangun SDM yang unggul dapat dilakukan dengan pendidikan, kesejahteraan dan derajat yang sama.

2. Untuk mengembangkan daerah setempat dengan menemukan bahwa individu tidak pernah lagi merasakan kebutuhan, kemiskinan dan pembangunan di mana-mana.
3. Melindungi masyarakat kelas bawah secara keseluruhan, masyarakat kelas atas.
4. Sambungan pintu kerja yang luar biasa terbuka untuk daerah setempat.
5. Pembangunan jalan dan wilayah serta pembuatan penginapan bagi pemerintahan metropolitan dan lokal yang layak dan ekonomis.
6. Administrasi ekonomis aset normal tanpa mempengaruhi sifat pengawasan.
7. Berbagi model-model vital yang dapat dilakukan oleh setiap bangsa untuk kemajuan internasional.

Sesuai Alisjahbana dan Endah, (2018: 60) menyatakan bahwa tujuan pengembangan yang didukung memiliki 17 tujuan ekstrem dari apa yang akan dicapai dengan 166 penanda tersusun dan 61 di antaranya merupakan petunjuk yang menekankan pada pelaksanaan, jelas pencapaian ini lebih dari apa yang umumnya dicapai. diantisipasi. dicapai oleh MDGs dengan catatan 8 tujuan terakhir didapat.

Di tingkat dunia, MDGs memiliki isu yang berbeda dalam pelaksanaannya, seperti kehidupan yang sehat dan bantuan pemerintah, sehingga dalam memahami SDGs ada peluang positif kekecewaan sehingga setiap negara yang memiliki isu terkait SDGs memiliki berbagai isu dalam setiap negara. Dilihat dari Sosial Ekonomi Indonesia, pelaksanaan SDGs memiliki peluang kekecewaan yang cukup baik di Indonesia pada tahun 2008-2030, dengan asumsi dilaksanakan dan hasil yang diselesaikan ternyata mengecewakan dalam pelaksanaannya sehingga dapat mempengaruhi Sosial-ekonomi kesejahteraan dan pelatihan di Indonesia. Jika kekecewaan hanya dalam satu siklus akan berdampak besar, dalam eksekusi ini dengan asumsi bahwa itu memiliki gangguan, itu akan mempengaruhi pergantian peristiwa praktis negara. (Alisjahbana dan Endah, 2018:114).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kajian peningkatan kota ditinjau dari tujuan peningkatan ekonomi (SDGS) dalam memahami bantuan pemerintah terhadap warga Desa Kalisongo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kemajuan kota dalam kaitannya dengan Manageable Improvement Objectives (SDGS) dalam memahami bantuan pemerintah kepada warga Desa Kalisongo

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Menyinggung rincian permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran dari pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kajian peningkatan kota berdasarkan tujuan pengembangan yang terkendali (SDGS) dalam memahami bantuan pemerintah terhadap individu Desa Kalisongo.
2. Untuk mengetahui variabel pendukung dan penghambat upaya peningkatan kota dalam kaitannya dengan tujuan peningkatan ekonomi SDGS dalam memahami bantuan pemerintah terhadap individu Desa Kalisongo.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

#### **a. Bagi akademis**

Pengujian hipotesis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dikembangkan dan menambah referensi dalam bidang penataan, khususnya dalam Pembangunan Desa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalisongo dan hambatan yang dihadapi.

### **b. Bagi Peneliti**

Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber data yang dapat dimanfaatkan dalam memperluas informasi, khususnya bagi para ilmuwan yang perlu memimpin penelitian tentang “Pengujian Pembangunan Desa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” Desa Kalisongo.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Pemerintah Desa Kalisongo**

Kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam membedah kemajuan kota mengingat tujuan perbaikan yang dapat dipertahankan dalam memahami bantuan pemerintah terhadap warga Desa Kalisongo.

### **b. Bagi Masyarakat Desa Kalisongo**

Eksplorasi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada daerah terkait pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGS) dalam memahami bantuan pemerintah kepada individu Desa Kalisongo..



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahi Ali Kabul, Sri Indra Trigunarso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Depok: Kencana.
- Alisjahbana Armida Salsiah, Endah Murniningtyas. 2018. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Konsep Target dan Startegi Implementasi*. Bandung: Unpad Press.
- Jamaludin, Nasrullah Adon. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moleong. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Miles Matthew, dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edision 3*. United States of America: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Pertiwi, Nurlita. 2017. *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*. Makassar: Pustaka Ramadhan.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal Penelitian dan Internet

- Akbar, Alfa. 2019. *Analisis Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (Tpb/Sdgs) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 e-ISSN: 2620-3332, SDGs Center, Universitas Islam Indragiri, Tembilahan Received: 21 Maret 2019; Accepted: 27 Maret 2019*.
- Lestari, Asih Widi, Firman Firdausi. 2017. *Peran Pemerintah Kota Batu Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 30, No. 3, tahun 2017, Hal. 260-265.
- Rizki, Afri Mulia., Nika, Saputra. 2020. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang, Jurnal El-Riyasah, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2020, 67-83*.
- SDGSIndonesia.Or.id.
- Sri Rahayu Budiani, dkk. 2018. *Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas Di Desa Sembungan, Wonoboso, Jawa Tengah*. ISSN

*0125 – 1790(Print), ISSN 2540-945X (Online). Majalah Geografi Indonesia Vol.32.,  
No.,2 september 2018 (170-176).*

**Undang-Undang**

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Berkelanjutan

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Nomor 8 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Tentang Kesejahteraan sosial